

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

I Putu Upabayu Rama Mahaputra¹
I Wayan Putra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: bayu_nez@yahoo.com / telp: +62 831 195 387 47

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *proportional stratified random sampling*. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Kata kunci: sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan, kualitas informasi laporan keuangan..

ABSTRACT

Government institutions at this time, should further to improve the quality of financial performance in order to create accountability and transparency. One of its efforts is the delivery of the qualified government financial statements and appropriate of accounting standards that have been set. The purpose of this study was to determine the effect of human resource capacity, utilization of local financial information systems, internal control systems and the implementation of government accounting standards to the quality of financial reporting information in SKPD Gianyar regency. The used sampling method is proportional stratified random sampling. Based on the analysis results, obtained that the human resource capacity, utilization of local financial information systems, internal control systems and the implementation of government accounting standards have a positive and significant effect to the quality of financial reporting information in SKPD Gianyar regency.

Keywords: *human resources, financial information systems area, the system of internal control, government accounting standards, the quality of financial reporting information.*

PENDAHULUAN

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar

mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi. (Andriani, 2010).

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Hal ini senada dengan penelitian Wiwik Andrini (2008) yang memperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan.

Selain sumber daya manusia, hal yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Fikri Miftahul (2011) yang memperoleh hasil Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal ini senada dengan penelitian Indriasari (2008) dan Hamdani (2011) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Mengacu dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PSAP, KK; 2010). Hal ini juga didukung dengan penelitian Nugrahem dan Subaweh (2008) yang memperoleh hasil SAP berpengaruh berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pada laporan keuangan.

Kawedar (2009) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I tahun 2013 opini BPK untuk LKPD Kabupaten Gianyar tahun 2012 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang tetap sama sejak tahun 2008. Menurut pernyataan Bupati Gianyar AA.Gde Agung Bharata (Anonim, 2013) mengatakan bahwa, PAD Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 30 Milyar lebih. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh kabupaten Gianyar sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012. Hal ini berarti beberapa LKPD Kabupaten Gianyar masih mengandung kelemahan-kelemahan dan belum mampu memenuhi kualitas informasi yang baik. Kelemahan-kelemahan tersebut salah satunya mungkin dipengaruhi dari kapasitas

sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan.

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan.

H₄: Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang akan dilakukan di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner seputar variabel yang dimaksud. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi SKPD Kabupaten Gianyar dan gambaran umum Kabupaten Gianyar. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Metode penentuan sampel yang digunakan

adalah *proportional stratified random sampling* yang merupakan pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Sampel dalam penelitian ini adalah adalah 18 kantor (SKPD) Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 8 Dinas Daerah dan 6 Lembaga Teknis dan 4 Kantor Kecamatan. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, kuisisioner, dan observasi nonpartisipan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Adapun model regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- \hat{Y} : Kualitas informasi pelaporan keuangan
- α : Nilai konstanta
- X_1 : Kapasitas sumber daya manusia
- X_2 : Penerapan Sistem informasi keuangan daerah
- X_3 : Sistem pengendalian intern
- X_4 : Implementasi standar akuntansi pemerintah
- β_1 : koefisien regresi Kapasitas sumber daya manusia (X_1)
- β_2 : koefisien regresi Penerapan Sistem informasi keuangan daerah (X_2)
- β_3 : koefisien regresi Sistem pengendalian intern (X_3)
- β_4 : koefisien regresi Implementasi standar akuntansi pemerintah (X_4)
- ε : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini berjumlah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar yang melaksanakan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan.. Sampel penelitian berdasarkan *proportional stratified random sampling*, maka Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 kantor SKPD Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 8 Dinas Daerah dan 6 Lembaga

Teknis dan 4 Kantor Kecamatan. Sehingga jumlah sampel total dengan periode pengamatan 3 tahun dan kuisioner yang kembali yaitu berjumlah 50.

Tabel 1.
Analisis Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
1	Kapasitas Sumber Daya Manusia	50	24,00	44,00	36,52	4,695
2	Pemanfaatan SIKD	50	26,00	44,00	36,74	3,988
3	Sistem Pengendalian Intern	50	35,00	47,00	40,38	3,544
4	Implementasi SAP	50	22,00	36,00	31,20	3,534
5	Kualitas Informasi Laporan Keuangan Valid N (listwise)	50	24,00	46,00	39,50	4,102

Sumber : data diolah, 2014

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Nilai minimum untuk variabel kapasitas sumber daya manusia adalah 24,00, nilai maksimumnya sebesar 44,00 dan *mean* sebesar 36,52. Deviasi standar untuk variabel kapasitas sumber daya manusia adalah 4,695, artinya terjadi penyimpangan nilai rata kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,695. Nilai minimum untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah 26,00, nilai maksimumnya sebesar 44,00, dan *mean* sebesar 36,74. Deviasi standar untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah 3,988, artinya terjadi penyimpangan nilai pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,988. Nilai minimum untuk variabel sistem pengendalian intern adalah 35,00, nilai maksimumnya sebesar 47,00, dan *mean* sebesar 40,38. Deviasi standar untuk variabel sistem pengendalian intern adalah 3,544, artinya terjadi penyimpangan nilai pengendalian intern akuntansi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,544. Nilai

minimum untuk variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan adalah 22,00, nilai maksimumnya sebesar 36,00, dan *mean* sebesar 31,20. Deviasi standar untuk variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan adalah 3,534, artinya terjadi penyimpangan nilai implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,534. Nilai minimum untuk variabel kualitas informasi pelaporan keuangan adalah 24,00, nilai maksimumnya sebesar 46,00, dan *mean* sebesar 39,50. Deviasi standar untuk variabel kualitas informasi pelaporan keuangan adalah 4,102, artinya terjadi penyimpangan nilai kualitas informasi pelaporan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,102.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa.

Gambar 1.
Uji Normalitas

Variabel Terikat	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig
Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan	0,628	0,825

Sumber : data diolah, 2014

Dalam penelitian ini menghasilkan koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,628 dengan *Asymp. Sig* sebesar 0,825. Nilai signifikansi lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka dapat diinterpretasikan bahwa model uji telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig.	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,088	Bebas heteroskedastisitas.
Pemanfaatan SIKD	0,773	Bebas heteroskedastisitas.
Sistem Pengendalian Intern	0,105	Bebas heteroskedastisitas.
Implementasi SAP	0,610	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : data diolah, 2014

Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa secara statistik berarti variabel tidak berpengaruh secara signifikan statistik karena *p-value* lebih besar dari 0,05.

Tabel 3.
Uji Multikolinearitas

Variabel	Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,643	1,556
Pemanfaatan SIKD	0,677	1,477
Sistem Pengendalian Intern	0,664	1,505
Implementasi SAP	0,503	1,990

Sumber : data diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 3, setiap variabel bebas yang diteliti memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda diolah dengan bantuan *software* SPSS for Windows dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,286	0,104	0,302	2,751	0,009
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,225	0,107	0,226	2,111	0,040
Sistem Pengendalian Intern	0,273	0,125	0,237	2,195	0,033
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan	0,302	0,140	0,267	2,151	0,037
Constant			3,859		
F_{hitung}			21,024		
Sig. F_{hitung}			0,000		
R^2			0,699		
<i>Adjusted R²</i>			0,620		

Sumber : data diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda pada Tabel 2. dapat dibentuk persamaan sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 3,859 + 0,286 X_1 + 0,225 X_2 + 0,273 X_3 + 0,302 X_4 \dots\dots\dots(1)$$

Nilai *adjusted R²* (Ghozali, 2011:97). Dari Tabel 4.9 dapat dilihat nilai *adjusted R²* sebesar 0,620. Hal ini berarti 62 persen dari variansi kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh variansi kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 38 persen dipengaruhi oleh variansi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan atau disebutkan dalam penelitian.

Nilai sig. $F_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Ini berarti variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh

secara statistik terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan uji t diperoleh hasil pengujian bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki koefisien regresi (β) dan signifikansi lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Hasil uji hipotesis H_1 yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai $\beta_1 = 0,286$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,009 yang berarti dibawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hasil ini mendukung hasil penelitian Andriani (2010) dan Winidyaningrum (2010) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.
- 2) Hasil uji hipotesis H_2 yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai $\beta_2 = 0,225$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,040 yang berarti dibawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan

sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Miftahul (2011), yang menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

- 3) Hasil uji hipotesis H_3 yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai $\beta_3 = 0,273$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,033 yang berarti dibawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hasil ini mendukung hasil penelitian Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo (2008), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- 4) Hasil uji hipotesis H_3 yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai $\beta_4 = 0,302$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,037 yang berarti dibawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hasil ini mendukung hasil penelitian Nugraheni, Purwaniati, dan Imam Subaweh (2011), yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil analisis diketahui bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.:

- 1) Dari hasil penelitian disarankan kepada pimpinan di setiap SKPD Kabupaten Gianyar agar bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dengan sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara efektif. SKPD Kabupaten Gianyar juga perlu mengimplementasikan SAP secara tepat dan lengkap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga opini BPK untuk Kabupaten Gianyar yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun-tahun berikutnya.
- 2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel bebas sehingga dapat memperkaya pengetahuan terutama untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor lain yang bisa memengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Salah satunya adalah

variabel pengawasan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah dalam bentuk APBD tidak menyimpang dari rencana yang digariskan. Yang kedua adalah variabel audit sektor publik yang merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak.

REFERENSI

- Andreica, Alina., *et all.* 2009. *Information Systems for Financial and Administrative Management. Case Study on Babes-Bolyai University. Journal Studia Europae*: h:59-76.
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Anonim. 2013. PAD Kabupaten Gianyar meningkat 30 Milyar lebih. Judul diakses di link issuu.com/hufajarbali/docs/fb290613 diunduh tanggal 23 April 2013.
- Arad, Hamed dan Hoda Arad. 2009. *Information Technology and Internal Controls*. Dalam *SSRN Digital Library, Information Systems and Technology*. USA.
- Hamdani, S. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
- Nugraheni, Purwaniati, dan Imam Subaweh. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13(1).

Gozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Dalam Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.

Puspita, A. 2013. Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Doctoral dissertation*.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013. *Melalui <http://www.bpk.go.id>* diunduh tanggal 10 januari 2013.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.